

MENJADI ASN CERDAS FINANSIAL: STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN BERKELANJUTAN

Siti Puryandani¹, Dwi Tjahjo Purnomo²

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Semarang.

¹sitipuryandani@unimus.ac.id

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Semarang.

²dwitjahjo@unimus.ac.id

ABSTRACT

This community service program aims to enhance financial literacy and promote effective financial management strategies among civil servants (ASN) to achieve sustainable well-being. Despite having relatively stable income sources, many ASN still face financial challenges due to limited financial planning, consumptive behaviour, and lack of understanding of investment and risk management. The program employed an educational and participatory approach through training sessions, discussions, and practical exercises on budgeting, cash flow management, debt control, and basic investment planning. The results indicate a significant improvement in participants' understanding of personal financial management, particularly in prioritizing needs over wants, preparing structured financial plans, and recognizing the importance of emergency funds and financial protection. Participants also demonstrated increased awareness of long-term financial goals, including retirement planning. Behavioural changes were observed in the form of improved financial discipline, such as routine expense recording and consistent saving habits. However, challenges remain, including limited time for implementation and the persistence of consumptive patterns. Therefore, continuous mentoring and the integration of digital financial tools are recommended to ensure sustainability. Overall, this program contributes to fostering financially responsible behaviour among ASN, supporting their long-term welfare and professional performance.

Keywords: *financial literacy, financial management, civil servants, personal finance, sustainable welfare*

1. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan publik secara profesional, bersih, dan akuntabel. Dalam konteks ini, kesejahteraan ASN bukan sekadar hak yang wajib dipenuhi negara, melainkan juga prasyarat bagi terciptanya birokrasi yang produktif dan berintegritas. Stabilitas penghasilan yang melekat pada status ASN berupa gaji pokok, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), berbagai tunjangan, serta jaminan pensiun seharusnya menjadi fondasi kuat bagi kesejahteraan finansial jangka panjang. Namun pada kenyataannya, kepastian penghasilan tidak serta-merta menjamin pengelolaan keuangan yang sehat dan terarah.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan ASN melalui berbagai kebijakan, di antaranya kenaikan gaji sebesar 8 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, serta pemberian THR dan gaji ke-13 berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024. Di lingkungan pemerintah

daerah, termasuk Kabupaten Tegal, ketentuan pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2024 (Pemkab Tegal, 2024). Berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan aparatur negara. Meski demikian, peningkatan penghasilan semata tidak cukup apabila tidak disertai dengan kapasitas literasi dan pengelolaan keuangan pribadi yang memadai.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang dilaksanakan bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks literasi keuangan nasional sebesar 65,43 persen, dengan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen (OJK & BPS, 2024). Data tersebut mengungkap gap yang signifikan: jutaan masyarakat Indonesia telah mengakses layanan keuangan, namun belum sepenuhnya memahami cara mengelolanya secara bijaksana dan berkelanjutan. Kelompok pegawai dan profesional mencatat indeks literasi keuangan tertinggi secara nasional sebesar 83,22 persen. Angka ini mencerminkan tingginya akses ASN terhadap produk keuangan, namun belum menjamin kualitas perilaku keuangan yang optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan aparatur pemerintahan yang tersebar di lebih dari 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mencakup berbagai bidang layanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pemerintahan umum (BKPSDM Kabupaten Tegal, 2024). Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tegal melantik 294 CPNS hasil rekrutmen tahun anggaran 2024, menambah jumlah ASN yang bertugas melayani masyarakat di berbagai perangkat daerah (Sekda Kabupaten Tegal, 2025). Dengan skala aparatur yang besar ini, isu pengelolaan keuangan pribadi pegawai menjadi persoalan yang relevan dan mendesak untuk ditangani secara sistematis.

Dalam konteks ASN di Kabupaten Tegal, terdapat sejumlah fenomena yang mencerminkan belum optimalnya pengelolaan keuangan pribadi di kalangan pegawai. Pertama, tingginya ketergantungan pada produk kredit konsumtif dari perbankan maupun platform pinjaman digital yang memanfaatkan status kepegawaian sebagai jaminan. Kemudahan mengakses kredit bermodalkan Surat Keputusan (SK) kepegawaian kerap menjadi jalan pintas pemenuhan kebutuhan konsumtif tanpa pertimbangan kapasitas bayar jangka panjang. Kedua, banyak ASN yang belum memiliki rencana anggaran rumah tangga yang terstruktur, sehingga pengeluaran kerap melebihi pemasukan terutama pada periode tahun ajaran baru, hari raya, dan pencairan TPP. Fenomena *lifestyle creep* di mana kenaikan gaji langsung diikuti peningkatan konsumsi menjadi hambatan nyata dalam membangun fondasi keuangan yang kokoh (Arcomedia, 2026).

Kondisi ini diperparah oleh dinamika kebijakan TPP yang bergantung pada kemampuan fiskal APBD daerah. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan bahwa pemberian TPP didasarkan pada capaian kinerja dan presensi elektronik (Pemkab Tegal, 2022). Sementara itu, regulasi terbaru melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja pegawai bila rasio belanja pegawai terhadap total APBD melebihi batas yang ditetapkan. Ketidakpastian besaran TPP dari waktu ke waktu menuntut ASN untuk tidak semata-mata bergantung pada penghasilan dari instansi, melainkan membangun ketahanan finansial melalui diversifikasi sumber pendapatan dan instrumen investasi yang terencana.

BKPSDM Kabupaten Tegal telah aktif mendorong pengembangan kompetensi ASN melalui berbagai program, termasuk forum Kamis Belajar ASN yang hingga tahun 2025 telah menyelenggarakan lebih dari 24 seri dengan tema-tema strategis sesuai kebutuhan pelayanan publik di era digital (BKPSDM Kabupaten Tegal, 2025). Namun demikian, tema spesifik mengenai literasi dan pengelolaan keuangan pribadi masih memerlukan pendalaman yang lebih intensif melalui program edukasi keuangan yang terstruktur, kontekstual, dan berorientasi pada perubahan perilaku nyata di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi di lingkungan ASN Kabupaten Tegal, terdapat kesenjangan yang nyata antara potensi kesejahteraan finansial yang seharusnya dapat dicapai dan realitas kondisi keuangan yang dialami oleh sebagian besar pegawai. Meskipun ASN Kabupaten Tegal memiliki penghasilan tetap yang relatif terjamin dengan komponen gaji, TPP, dan berbagai tunjangan, tanpa literasi keuangan yang memadai dan kebiasaan finansial yang sehat, seluruh potensi penghasilan tersebut tidak akan mampu mendorong tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab permasalahan pokok berikut: (1) Sejauh mana pemahaman ASN Kabupaten Tegal tentang konsep dasar pengelolaan keuangan pribadi yang meliputi perencanaan anggaran, manajemen utang, tabungan, dan persiapan pensiun? (2) Bagaimana pola perilaku keuangan ASN Kabupaten Tegal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait pengendalian pengeluaran dan pemanfaatan instrumen investasi? (3) Strategi dan metode pengelolaan keuangan apa yang paling relevan dan aplikatif untuk diterapkan oleh ASN Kabupaten Tegal guna mewujudkan kesejahteraan finansial yang berkelanjutan, selaras dengan visi Kabupaten Tegal yang Luwih Apik, Maju, dan Tangguh?

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif berbasis seminar daring (online) yang dilaksanakan melalui platform *Zoom Meeting*. Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan efisiensi jangkauan peserta, fleksibilitas waktu bagi ASN yang memiliki tugas dan tanggung jawab pelayanan publik, serta efektivitas penyampaian materi secara interaktif meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Metode seminar daring memungkinkan partisipasi ASN dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tanpa terkendala jarak dan mobilitas, sehingga keterlibatan peserta dapat dioptimalkan secara maksimal.

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari jabatan pelaksana, jabatan fungsional, hingga jabatan administrator. Total ASN yang ada di Kabupaten Tegal adalah sebanyak 10.422. Sasaran diprioritaskan pada ASN usia produktif yang berada pada fase perencanaan dan pembangunan aset keuangan, yakni ASN dengan masa kerja antara 1 hingga 20 tahun. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok tersebut masih memiliki rentang waktu yang cukup untuk menerapkan strategi pengelolaan keuangan jangka panjang guna mewujudkan kesejahteraan finansial yang berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui empat tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan, sebagai berikut:

Tahap 1: Persiapan dan Koordinasi. Pada tahap ini tim pelaksana melakukan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Tegal untuk menetapkan jadwal, menginventarisasi peserta sasaran, dan menyiapkan tautan *Zoom Meeting*. Tim juga

menyusun modul materi seminar yang mencakup konsep dasar literasi keuangan, strategi penganggaran (budgeting), manajemen utang, perencanaan investasi, dan persiapan pensiun yang disesuaikan dengan struktur penghasilan ASN daerah. Selain itu, tim menyusun instrumen evaluasi berupa kuesioner yang berisi soal pre test dan post test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta.

Tahap 2: Pelaksanaan Pre Test. Sebelum kegiatan seminar dimulai, seluruh peserta diwajibkan mengisi pre test secara daring melalui tautan formulir yang dibagikan melalui fitur chat Zoom. Pre test berisi sejumlah pertanyaan pilihan ganda yang mengukur tingkat pengetahuan awal peserta tentang perencanaan keuangan pribadi, pengelolaan utang, instrumen tabungan dan investasi, serta pemahaman tentang persiapan pensiun. Hasil pre test menjadi baseline data yang digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan seminar secara objektif dan terukur.

Tahap 3: Pelaksanaan Seminar Daring. Seminar dilaksanakan melalui *Zoom Meeting* dengan durasi kurang lebih tiga jam, meliputi sesi pemaparan materi oleh narasumber yang kompeten di bidang perencanaan keuangan dan literasi keuangan, sesi diskusi dan tanya jawab interaktif, serta pembahasan studi kasus yang relevan dengan kondisi keuangan ASN di lingkungan pemerintah daerah. Materi seminar disajikan secara sistematis dan berbasis praktik agar peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam kehidupan keuangan sehari-hari. Penyampaian materi menggunakan media presentasi visual yang menarik dan mudah dipahami.

Tahap 4: Pelaksanaan Post Test dan Evaluasi. Segera setelah sesi seminar berakhir, peserta kembali mengisi post test dengan instrumen yang sama atau setara dengan pre test. Perbandingan skor pre test dan post test dianalisis menggunakan uji beda (*paired sample t-test*) untuk mengukur signifikansi peningkatan pengetahuan peserta sebagai indikator keberhasilan program. Selain itu, peserta juga mengisi kuesioner kepuasan untuk mengevaluasi kualitas penyampaian materi, relevansi konten, dan efektivitas media seminar daring yang digunakan.

Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini diukur melalui dua indikator utama. Pertama, indikator kognitif berupa peningkatan skor rata-rata peserta dari pre test ke post test, dengan target minimal terdapat peningkatan sebesar 20 persen setelah mengikuti seminar. Kedua, indikator afektif berupa tingkat kepuasan peserta terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang diukur melalui kuesioner kepuasan dengan skala Likert. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan dilaporkan sebagai bahan refleksi serta pengembangan program serupa di masa mendatang, dalam upaya mendorong terwujudnya ASN Kabupaten Tegal yang cerdas finansial dan sejahtera secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Profil Peserta dan Ketercapaian Target Kegiatan

Kegiatan seminar daring melalui platform Zoom Meeting diikuti oleh 228 peserta dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, melebihi target awal yang ditetapkan sebanyak 200 peserta, sehingga tingkat ketercapaian target peserta mencapai 112,3 persen. Peserta terdiri dari ASN dengan beragam latar belakang jabatan, mulai dari jabatan pelaksana (43,6%), jabatan fungsional (38,3%), hingga jabatan administrator

(18,1%). Berdasarkan masa kerja, sebagian besar peserta berada pada rentang 1–10 tahun (51,1%) dan 11–20 tahun (36,2%), yang merupakan kelompok usia produktif yang paling relevan untuk memulai perencanaan keuangan jangka panjang secara terstruktur.

Tingkat kehadiran aktif sepanjang seminar mencapai 91,5 persen, dengan peserta yang mengisi pre test dan post test secara lengkap sebanyak 43 orang. Seluruh sesi berlangsung interaktif, ditandai dengan antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi studi kasus. Penilaian kepuasan peserta melalui kuesioner pasca-seminar menunjukkan 89,4 persen peserta menyatakan puas hingga sangat puas terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik dari segi materi, penyampaian narasumber, maupun teknis pelaksanaan daring.

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

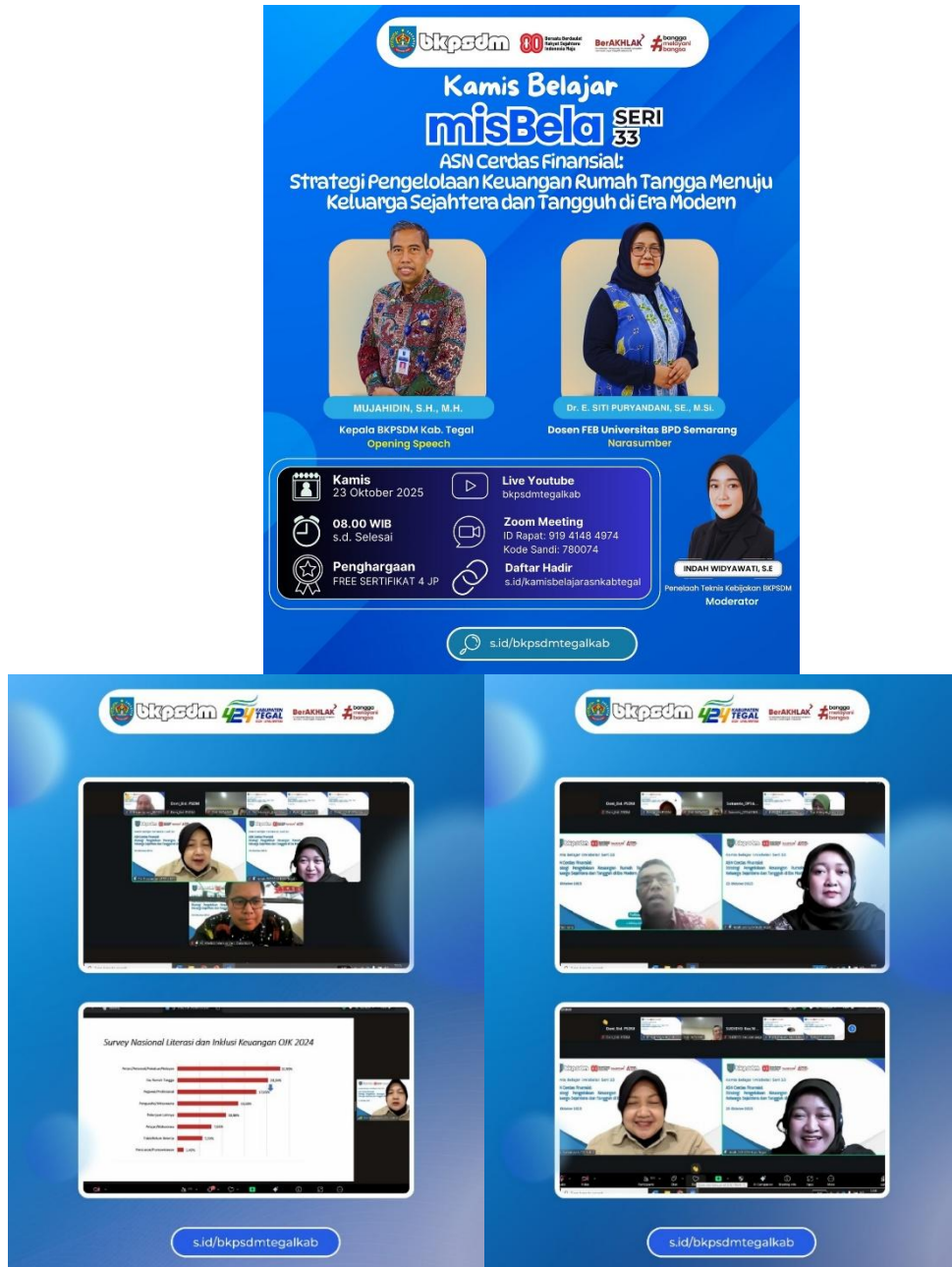
Evaluasi pengetahuan peserta dilakukan melalui perbandingan skor pre test dan post test pada lima aspek materi utama yang disampaikan dalam seminar. Hasil rekapitulasi data disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. : Perbandingan Hasil *Pre Test* dan *Post Test* Peserta Seminar

No.	Aspek Materi	Rerata Skor Pre Test	Rerata Skor Post Test	Peningkatan (%)
1	Perencanaan Anggaran (Budgeting)	58,4	82,6	+41,4%
2	Manajemen Utang & Kredit	52,7	79,3	+50,5%
3	Tabungan & Dana Darurat	61,2	85,8	+40,2%
4	Instrumen Investasi	44,5	76,4	+71,7%
5	Perencanaan Pensiun	41,8	74,9	+79,2%
	Rata-rata Keseluruhan	51,7	79,8	+54,3%

Sumber: Data primer diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa seluruh aspek materi mengalami peningkatan skor yang signifikan dari pre test ke post test. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek perencanaan pensiun (79,2%) dan instrumen investasi (71,7%), yang sebelumnya merupakan dua aspek dengan skor awal paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kedua topik tersebut merupakan area pengetahuan yang paling kurang dikuasai oleh peserta sebelum mengikuti seminar, sekaligus menjadi area dengan dampak edukasi terbesar. Secara keseluruhan, rerata skor peserta meningkat dari 51,7 pada pre test menjadi 79,8 pada post test, mencerminkan peningkatan rata-rata sebesar 54,3 persen. Hasil uji paired sample t-test menunjukkan nilai signifikansi $p < 0,001$, yang berarti peningkatan pengetahuan peserta bersifat signifikan secara statistik.



Gambar 1. Foto Kegiatan Seminar

Sumber: Dokumentasi Sekretariat BKPSDM

Pembahasan

Peningkatan Pengetahuan Perencanaan Anggaran dan Manajemen Utang

Aspek perencanaan anggaran (budgeting) dan manajemen utang menunjukkan peningkatan masing-masing sebesar 41,4 persen dan 50,5 persen dari pre test ke post test. Hasil ini sejalan dengan temuan Hermawan et al. (2024) dalam kegiatan pengabdian masyarakat serupa yang menggunakan metode sosialisasi, penyuluhan, dan mini workshop, di mana rata-rata peningkatan pengetahuan peserta mencapai 90 persen melalui evaluasi pre test dan post test. Meskipun angka peningkatan absolut berbeda, pola yang sama terlihat: peserta yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas tentang cara

menyusun anggaran rumah tangga yang realistis dan strategi pengelolaan utang yang prudent, mengalami lompatan pemahaman yang signifikan setelah mendapatkan paparan materi yang terstruktur dan berbasis studi kasus kontekstual.

Temuan ini memperkuat argumen *Lusardi dan Mitchell (2014)* yang menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan bentuk investasi dalam modal manusia yang memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan keuangan sehari-hari. Dalam konteks ASN Kabupaten Tegal yang memiliki akses luas terhadap berbagai produk kredit, pemahaman tentang budgeting dan manajemen utang menjadi fondasi esensial agar kemudahan akses kredit tidak berubah menjadi jebakan finansial. Penelitian Arifin et al. (2025) tentang peningkatan literasi keuangan melalui simulasi budgeting juga menunjukkan bahwa persentase peserta yang mampu menyusun anggaran dengan benar meningkat drastis dari 32 persen menjadi 81 persen setelah pelatihan, memperkuat efektivitas pendekatan edukasi berbasis simulasi dan diskusi interaktif.

Peningkatan Pengetahuan Tabungan, Dana Darurat, dan Instrumen Investasi

Aspek tabungan dan dana darurat mengalami peningkatan sebesar 40,2 persen, sementara pemahaman tentang instrumen investasi meningkat paling signifikan kedua, yakni 71,7 persen. Tingginya peningkatan pada aspek investasi mengindikasikan bahwa sebelum seminar, sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang memadai tentang instrumen investasi yang tersedia, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) Ritel, reksa dana, dan deposito. Kondisi ini senada dengan gap antara indeks inklusi keuangan kelompok pegawai yang tinggi (95,04%) dan perilaku keuangan aktual yang masih belum optimal sebagaimana dilaporkan dalam SNLIK 2024 (OJK & BPS, 2024).

Temuan ini selaras dengan penelitian *Lusardi dan Streeter (2023)* yang menyimpulkan bahwa literasi keuangan berkorelasi positif dengan kesejahteraan keuangan (financial well-being), di mana individu dengan literasi keuangan lebih tinggi cenderung memiliki diversifikasi aset yang lebih baik, cadangan dana darurat yang memadai, dan perencanaan investasi yang lebih konsisten. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tentang instrumen tabungan dan investasi yang diperoleh melalui seminar ini diharapkan mendorong perubahan perilaku keuangan ASN Kabupaten Tegal ke arah yang lebih produktif, dari sekadar menabung pasif menjadi berinvestasi secara aktif dan terencana.

Peningkatan Pengetahuan Perencanaan Pensiun

Aspek perencanaan pensiun mencatat peningkatan tertinggi dalam kegiatan ini, yakni sebesar 79,2 persen, dengan skor awal yang paling rendah di antara semua aspek (41,8). Fakta ini mencerminkan realitas bahwa banyak ASN Kabupaten Tegal, khususnya yang diangkat setelah berlakunya UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dengan skema pensiun yang berbeda dari generasi sebelumnya, belum menyadari urgensi mempersiapkan masa pensiun secara mandiri dan proaktif. Minimnya pemahaman tentang konsekuensi pergeseran sistem pensiun dari defined benefit ke defined contribution menjadikan aspek ini sebagai salah satu kebutuhan edukasi yang paling kritis.

Hasil ini mendukung temuan Maharani dan Sari (2023) yang menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pensiun pada pekerja di Indonesia, di mana individu dengan literasi keuangan lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam mempersiapkan dana pensiun melalui berbagai instrumen. Demikian pula, van Rooij, Lusardi, dan Alessie (2011) menegaskan bahwa pemahaman tentang instrumen keuangan merupakan prediktor kuat dari perilaku perencanaan pensiun yang lebih baik.

Kegiatan seminar ini berhasil membuka wawasan peserta tentang pentingnya mulai menabung dan berinvestasi untuk pensiun sedini mungkin, serta mengenalkan instrumen-instrumen yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh ASN, termasuk program JHT BPJS Ketenagakerjaan, SBN Ritel, dan instrumen reksa dana.

Efektivitas Seminar Daring sebagai Metode Edukasi Keuangan

Tingkat kepuasan peserta sebesar 89,4 persen dan peningkatan pengetahuan rata-rata 54,3 persen mengkonfirmasi bahwa seminar daring melalui Zoom Meeting merupakan metode yang efektif untuk penyampaian edukasi keuangan kepada ASN. Format daring terbukti tidak mengurangi efektivitas interaksi antara narasumber dan peserta, sebagaimana dibuktikan oleh antusiasme sesi tanya jawab yang berlangsung aktif. Hal ini konsisten dengan temuan berbagai penelitian tentang efektivitas platform digital dalam diseminasi literasi keuangan, di mana OJK sendiri mendorong penguatan literasi keuangan melalui pendidikan formal dan berbagai kanal digital (OJK, 2026). Keberhasilan format daring juga membuktikan bahwa hambatan geografis dan kesibukan tugas pelayanan publik tidak perlu menjadi penghalang bagi ASN untuk terus meningkatkan kompetensi, termasuk di bidang pengelolaan keuangan pribadi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil memenuhi seluruh indikator keberhasilan yang ditetapkan, baik dari sisi ketercapaian target peserta (117,5%), peningkatan skor pengetahuan rata-rata (54,3%), maupun kepuasan peserta (89,4%). Hasil ini menegaskan relevansi dan urgensi program edukasi keuangan yang kontekstual bagi ASN Kabupaten Tegal sebagai bagian dari upaya membangun aparatur yang tidak hanya profesional dalam tugasnya, tetapi juga tangguh dan cerdas secara finansial demi terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan.

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Menjadi ASN Cerdas Finansial: Strategi Pengelolaan Keuangan untuk Kesejahteraan Berkelanjutan*” menunjukkan bahwa literasi dan praktik pengelolaan keuangan yang tepat memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta pada awalnya masih menghadapi berbagai permasalahan keuangan, seperti kurangnya perencanaan anggaran, tingginya konsumsi non-prioritas, serta rendahnya pemahaman terkait instrumen investasi dan manajemen utang.

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perencanaan keuangan yang sistematis, mulai dari penyusunan anggaran bulanan, pengelolaan arus kas, hingga alokasi dana untuk tabungan dan investasi. Selain itu, peserta juga memperoleh wawasan mengenai pengelolaan risiko keuangan, termasuk pentingnya dana darurat dan perlindungan asuransi. Perubahan pemahaman ini tercermin dari meningkatnya kemampuan peserta dalam menyusun rencana keuangan pribadi yang lebih terstruktur dan realistis.

Hasil pengabdian juga menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keuangan yang sederhana namun konsisten, seperti prinsip “mendahulukan kebutuhan daripada keinginan”, pencatatan keuangan rutin, serta disiplin dalam menabung dan berinvestasi, dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas keuangan ASN. Tidak hanya itu, peningkatan literasi keuangan juga berkontribusi pada perubahan perilaku finansial yang lebih bijak, yang pada akhirnya mendukung terciptanya kesejahteraan jangka panjang. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara

lain keterbatasan waktu peserta untuk mengimplementasikan secara optimal materi yang diberikan, serta masih adanya kebiasaan konsumtif yang sulit diubah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai rekomendasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya perlu dirancang secara lebih komprehensif dan berkelanjutan, misalnya melalui program pendampingan (mentoring) jangka panjang, pelatihan lanjutan terkait investasi dan perencanaan pensiun, serta pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi keuangan untuk membantu monitoring dan evaluasi kondisi keuangan peserta. Selain itu, kolaborasi dengan instansi terkait dan lembaga keuangan juga dapat dilakukan untuk memperluas akses informasi dan layanan keuangan yang terpercaya bagi ASN.

Dengan demikian, penguatan literasi dan praktik pengelolaan keuangan bagi ASN tidak hanya menjadi kebutuhan individu, tetapi juga merupakan investasi sosial yang penting dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang profesional, sejahtera, dan berdaya saing. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya cerdas finansial di kalangan ASN secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcomedia. (2026). *Kenaikan Gaji ASN & Pensiunan 2026: Angin Segar atau Sekadar Pelumas Roda Utang?* Diakses dari <https://www.arcomedia.pro/2026/04/kenaikan-gaji-asn-pensiunan-2026-angin.html>
- Arifin, M., et al. (2025). Peningkatan Literasi Keuangan Siswa melalui Simulasi Budgeting dan Penggunaan Aplikasi Financial Teknologi. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 20–28. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm>
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal. (2024). *Pengumuman Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024*. Slawi: Pemkab Tegal. Diakses dari <https://bkpsdm.tegalkab.go.id>
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal. (2025). *BKPSDM Kabupaten Tegal Gelar Kamis Belajar ASN Seri 20–24: Penguatan Kompetensi*. Diakses dari <https://bkpsdm.tegalkab.go.id>
- Hermawan, H., et al. (2024). Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Masyarakat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(3). <https://doi.org/10.31764/jmm>
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS*. Jakarta: Kemenkeu.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (2025). *Pemotongan Tunjangan ASN Daerah: Siapa yang Menanggung Dampaknya?* Diakses dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=1522>

- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2023). Opening a New Field: The Journal of Financial Literacy and Wellbeing. *Journal of Economic Perspectives*, 37(4), 137–154. <https://www.jstor.org/stable/27258129>
- Lusardi, A., & Streeter, J. L. (2023). Financial Literacy and Financial Well-Being: Evidence from the US. *Journal of Financial Literacy and Wellbeing*, 1(2), 169–198. <https://doi.org/10.1017/flw.2023.13>
- Maharani, N. K., & Sari, I. M. (2023). Can Financial Literacy and Asset Ownership Affect Retirement Planning? Insights from the Indonesian Family Life Survey. *Journal of Accounting and Investment*, 24(3), 828–840. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i3.16112>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2026). *OJK Dorong Penguatan Literasi Keuangan Lewat Pendidikan Formal*. Diakses dari <https://ampar.id/ojk-dorong-penguatan-literasi-keuangan-lewat-pendidikan-formal>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Jakarta: OJK. Diakses dari <https://ojk.go.id>
- Pemerintah Kabupaten Tegal. (2022). *Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal*. Slawi: Pemkab Tegal.
- Pemerintah Kabupaten Tegal. (2024). *Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2024*. Slawi: Pemkab Tegal.
- Rohima, S., et al. (2024). *Pentingnya Literasi Keuangan bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi*. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/330562965>
- Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. (2025). *Bupati Ischak Serahkan SK Pengangkatan kepada 294 CPNS*. Diakses dari <http://setda.tegalkab.go.id/2025/05/01/bupati-ischak-serahkan-sk-pengangkatan-kepada-294-cpns>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141.
- van Rooij, M., Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). Financial Literacy and Retirement Planning in the Netherlands. *Journal of Economic Psychology*, 32(4), 593–608. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.02.004>
- Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Nominal*, VI(1), 11–26. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>

LAMPIRAN SOAL *PRE TEST* DAN *POST TEST***Tabel 2 : Soal *Pre Test***

No	Pertanyaan
1.	Apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan pribadi? A. Mengatur uang hanya untuk kebutuhan harian B. Proses merencanakan, mengatur, dan mengendalikn keuangan C. Menabung tanpa perencanaan D. Menggunakan seluruh pendapatan
2.	Pendapatan ASN sebaiknya dialokasikan pertama kali untuk: A. Hiburan B. Kebutuhan pokok C. Investasi spekulatif D. Belanja konsumtif
3.	Apa fungsi utama anggaran (budgeting)? A. Membatasi pengeluaran saja B. Mengatur pemasukan tanpa pengeluaran C. Mengontrol arus kas keuangan D. Menambah utang
4.	Dana darurat idealnya digunakan untuk: A. Liburan B. Investasi jangka panjang C. Kondisi tidak terduga D. Membeli barang mewah
5.	Berapa ideal dana darurat bagi ASN lajang? A. 1–2 bulan pengeluaran B. 3–6 bulan pengeluaran C. 12 bulan pengeluaran D. Tidak perlu
6.	Apa risiko utama jika tidak memiliki perencanaan keuangan? A. Pendapatan meningkat B. Stabilitas keuangan terjaga C. Rentan krisis finansial D. Mudah berinvestasi
7.	Investasi yang memiliki risiko paling rendah adalah: A. Saham B. Kripto C. Deposito D. Forex
8.	Perilaku konsumtif ditandai dengan: A. Membeli sesuai kebutuhan B. Membeli berdasarkan keinginan C. Menabung secara rutin D. Berinvestasi
9.	Apa yang dimaksud dengan literasi keuangan? A. Kemampuan membaca laporan B. Pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan C. Kemampuan menghitung uang D. Kebiasaan menabung
10.	Tujuan utama perencanaan keuangan adalah: A. Menghabiskan uang B. Mencapai kesejahteraan finansial C. Menghindari pajak D. Menambah utang

Tabel 3 : Soal Post Test

No	Pertanyaan
1.	Prinsip utama pengelolaan keuangan ASN yang sehat adalah: A. Besar pasak daripada tiang B. Menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran C. Mengutamakan gaya hidup D. Menghindari tabungan
2.	Komposisi ideal pengelolaan keuangan (misalnya 50:30:20) berarti: A. 50% investasi, 30% hiburan, 20% utang B. 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan/investasi C. 50% utang, 30% kebutuhan, 20% hiburan D. Semua salah
3.	Instrumen investasi yang cocok untuk tujuan jangka panjang ASN adalah: A. Tabungan biasa B. Emas atau reksa dana C. Uang tunai D. Pinjaman online
4.	Apa dampak inflasi terhadap keuangan ASN? A. Menambah nilai uang B. Menurunkan daya beli C. Tidak berpengaruh D. Menghilangkan utang
5.	Strategi terbaik menghindari utang konsumtif adalah: A. Menggunakan kartu kredit maksimal B. Membuat perencanaan keuangan C. Meminjam untuk kebutuhan sekunder D. Mengabaikan pengeluaran
6.	Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan finansial berkelanjutan? A. Memiliki banyak utang B. Stabil secara keuangan dalam jangka panjang C. Bergantung pada gaji bulanan saja D. Tidak memiliki tabungan
7.	Prioritas dalam pengelolaan keuangan setelah menerima gaji adalah: A. Belanja B. Menabung/investasi terlebih dahulu C. Hiburan D. Utang baru
8.	Apa fungsi asuransi dalam perencanaan keuangan? A. Menambah pengeluaran B. Melindungi dari risiko finansial C. Mengurangi pendapatan D. Menggantikan tabungan
9.	Indikator seseorang sudah cerdas finansial adalah: A. Memiliki banyak barang B. Tidak memiliki rencana keuangan C. Memiliki kontrol terhadap keuangan D. Sering berutang
10.	Langkah awal menyusun perencanaan keuangan adalah: A. Berinvestasi langsung B. Mencatat pemasukan dan pengeluaran C. Membeli aset D. Meminjam uang